

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk merealisasi kecerdasan tersebut tidak lahir dengan sendirinya, diperlukan upaya dan komponennya. Salah satu upaya dan komponen penting itu adalah pendidikan. Keberadaan pendidikan berfungsi sebagai jembatan untuk merealisasi tujuan bangsa. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan kecerdasan sekaligus mengangkat harkat martabat bangsa agar sejajar dengan bangsa lain. Karena itu pendidikan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini dikarenakan pendidikan tidak berjalan statis, tetapi berkembang dinamis.

Perkembangan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong oleh tuntutan kebutuhan manusia agar lebih sejahtera, kehidupannya lebih mudah sekaligus lebih berkualitas. Salah satu wujud perkembangan pendidikan adalah dengan adanya perubahan atau penyempurnaan perangkat pendidikan, salah satu diantaranya adalah perbaikan atau perubahan kurikulum.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19). Pengaturan dan perubahan kurikulum tergantung pada kebutuhan, bisa tambal sulam, bisa pula secara menyeluruh. Akibat perubahan itu terjadi perbedaan antara kurikulum yang satu dengan lainnya. Salah satu perbedaan yang mendasar adalah pada aspek organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum pada kurikulum tradisional berpusat pada mata pelajaran sedangkan kurikulum modern berpusat pada masalah atau topik untuk mendorong peserta didik belajar mengalami sendiri secara langsung.

Selama setengah dekade ini, pendidikan di Indonesia mengalami dua kali perubahan kurikulum, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. KTSP merupakan kurikulum yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (Khaeruddin, dkk 2007: 79).

KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BNSP. Pengembangan KTSP diserahkan kepada para pelaksana pendidikan (guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan) untuk mengembangkan berbagai kompetensi pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) pada setiap satuan pendidikan, di sekolah, dan daerah masing-masing (Mulyasa 2007: 40).

KTSP disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan tujuan agar kurikulum dapat sesuai dengan kemampuan guru maupun peserta didik yang ada dalam satuan pendidikan tertentu. Dengan konsep seperti itu, diharapkan satuan pendidikan memiliki tanggungjawab yang besar untuk pelaksanaan KTSP. Namun demikian pelaksanaan KTSP tidak berlangsung sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan tersebut dirasa kurang efektif karena tidak semua satuan pendidikan melaksanakan KTSP dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketertinggalan atau rendahnya kualitas pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain.

Laporan TIMSS dan hasil studi PISA yang menunjukkan rendah dan tertinggalnya kualitas pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain.

Laporan *Trend in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) tahun 2011, menyebutkan bahwa nilai rata-rata matematika siswa Indonesia menempati urutan ke-38 dari 42 negara. Sedangkan untuk sains justru lebih mengecewakan lagi, yaitu menempati urutan ke-40 dari 42 negara. Sebagian besar siswa hanya mampu menyelesaikan soal sampai level menengah saja sehingga disinyalir ada perbedaan bahan ajar di Indonesia dengan diujikan di tingkat internasional. Hasil studi TIMSS menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking amat rendah dalam kemampuan; 1) memahami informasi yang kompleks; 2) teori, analisis dan pemecahan masalah; 3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan 4) melakukan investigasi. Hasil studi *Program for International Student Assessment* (PISA), yaitu studi yang memfokuskan pada literasi bacaan, matematika, dan IPA, menunjukkan peringkat Indonesia baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. Kriteria penilaian mencakup kemampuan kognitif dan keahlian siswa membaca, matematika dan sains. Hampir semua siswa Indonesia ternyata cuma menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara banyak siswa negara maju

maupun berkembang lainnya, menguasai pelajaran sampai level 4,5, bahkan 6 (Kemendikbud 2012).

Laporan dan hasil studi tersebut menunjukkan perlu adanya penyempurnaan dan perubahan pada KTSP. Karena KTSP dipandang belum berperan optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ketidakmampuan tersebut karena beberapa kelemahan dari KTSP, diantaranya:

1. Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasaan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.
2. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
3. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
4. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan (misalnya, pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skill* dan *hard skill*, kewirausahaan) belum terakomodasi dalam kurikulum.
5. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
6. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.
7. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.
8. KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir (Husanah dan Setyaningrum 2013: 6).

Guna menjawab ketertinggalan pendidikan dan kelemahan KTSP tersebut, pada pertengahan tahun 2013 pemerintah menerapkan berlakunya kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum baru ini berbasis karakter dengan rumusan kompetensi yang lahir sebagai jawaban dari kritikan terhadap KTSP, serta disesuaikan dengan perkembangan dan dunia kerja (Mulyasa 2013: 163).

Kurikulum 2013 dibandingkan dengan KTSP memiliki keunggulan sebagai berikut:

Pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual), karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan,

kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang ada dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan (Mulyasa 2013: 163-164).

Konsep kurikulum 2013 memandang peserta didik memiliki potensi yang berbeda dan bervariasi, dalam hal tertentu memiliki potensi tinggi, tetapi dalam hal lain mungkin biasa-biasa saja, bahkan rendah (Mulyasa 2013: 165). Hal ini menjadi salah satu latar belakang pemberlakuan kurikulum 2013.

Perbedaan konsep di atas berakibat pada perbedaan pelaksanaan. Perbedaan pelaksanaan antara KTSP dengan Kurikulum 2013 adalah:

Pertama, dari segi mata pelajaran. KTSP mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu dan dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri sedangkan Kurikulum 2013 tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan dirancang terkait satu dengan yang lain serta memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Kedua, dari segi bahasa. KTSP bahasa Indonesia sebagai pengetahuan sedangkan Kurikulum 2013 bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan *carrier of knowledge*. Ketiga, dari segi pendekatan pembelajaran. KTSP tiap mata pelajaran menggunakan pendekatan yang berbeda sedangkan Kurikulum 2013 semua mata pelajaran menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan (Mulyasa 2013: 172-173).

Perbedaan sekaligus keunggulan kurikulum 2013 di atas menjadi pemicu kutnya pemberlakuan kurikulum baru tersebut.

Pemberlakuan kurikulum 2013 sebagaimana karakteristiknya sudah dipaparkan di atas, mengakibatkan perubahan pada paradigma pembelajaran. Perubahan tersebut terlihat dari pendekatan, penilaian, model, metode pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajarannya berbeda dengan KTSP, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan ini menekankan pada lima pengalaman belajar pokok yaitu mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan (Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 Lampiran IV). Selain itu terdapat perpaduan penalaran dalam pembelajaran yang tidak ada dalam KTSP yaitu:

Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran berlangsung dengan memadukan penalaran induktif dan penalaran deduktif. Pertama, pendekatan induktif menghendaki agar proses pembelajaran dilalui dengan pengamatan dan penemuan fakta-fakta lapangan, yang kemudian diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi siswa. Kedua, pendekatan deduktif merupakan pendekatan pembelajaran yang hanya memanfaatkan pengetahuan dan teori-teori yang ada. Para siswa menerima dan menjadikannya bagian dari pengetahuan baru (Kosasih 2014: 70).

Tujuan pendekatan saintifik dimaksudkan untuk merombak paradigma proses pembelajaran yang sebelumnya hanya berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, dengan pendekatan saintifik siswa diharapkan lebih aktif karena menjadi pusat pembelajaran.

Perbedaan penekanan lainnya adalah pada penilaian. Penilaian pada KTSP hanya melakukan penilaian secara parsial, yang hanya menilai dari satu aspek saja. Sedangkan penilaian dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik berusaha mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh (holistik), yakni mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kosasih 2014: 131).

Penilaian autentik bertujuan mengembangkan pembelajaran yang dilakukan siswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, dan menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Selain itu dalam pelaksanaan penilaian autentik dilakukan ketika siswa melakukan pembelajaran dan tidak hanya pada akhir pembelajaran (Kosasih 2014: 132). Maksudnya penilaian autentik menilai tidak hanya di akhir pembelajaran tetapi pada kegiatan siswa sepanjang proses pembelajaran. dalam hal ini bentuk penilaiannya tidak hanya penilaian tertulis dapat pula secara lisan.

Perbedaan lainnya pada model pembelajaran. Banyak macam model pembelajaran dengan langkah pelaksanaan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu pencapaian pemahaman siswa. Model pembelajaran merupakan penunjang dari proses pembelajaran dalam mencapai tujuannya. Model pembelajaran merupakan pola dalam merancang pembelajaran, dapat juga didefinisikan sebagai langkah pembelajaran, dan perangkatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran (Akbar 2013: 49). Model pembelajaran kurikulum 2013 diantaranya *Inkuiri, Problem*

Based Learning, Portofolio, dan *Discovery Learning*. Berbagai model pembelajaran tersebut digunakan sebagai sarana pencapaian kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum 2013. Penggunaan model pembelajaran tersebut diharapkan kompetensi spiritual, sosial dan pengetahuan siswa dapat dikembangkan secara optimal.

Salah satu model pembelajaran yang sering digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran tersebut menekankan pada masalah sebagai fokus pengembangan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri (Serafino dalam Eggen dan Kauchak 2012: 307). Model pembelajaran ini disebut pula *problem Based Learning*, model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata (Triyanto 2011: 90). Maksudnya tidak hanya mendorong siswa sekedar menghafal konsep, tetapi juga memahami konsep. Guru tidak hanya meminta siswa mendengarkan penjelasan, tetapi mendorong siswa untuk tanggap pada permasalahan dan membuat solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang ditawarkan harus sesuai dengan yang terjadi di kehidupan nyata. Misalnya permasalahan dalam perkembangan hukum dan sikap demokratis (Elizma 2014), yang dibahas dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

PPKn merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1). Mata pelajaran tersebut mempelajari perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam berbagai aspeknya. Salah satunya mendeskripsikan tentang pengembangan perilaku, sikap, nilai dan norma yang ada di masyarakat. Agar materi tersebut lebih bermakna, maka dalam kurikulum 2013 dikembangkan dengan berbagai metode, salah satunya dengan model pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*). Model pembelajaran pada kurikulum 2013 dapat diterapkan dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Baik jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun kejuruan.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu (Penjelasan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2003). Perbedaan kejuruan tingkat menengah disebut SMK, jenis pendidikan

ini mengajarkan keterampilan praktis, guna mengisi peluang kerja. Struktur kurikulum SMK sama dengan SMA, kerangka dasar kurikulumnya berfungsi sebagai acuan pelaksanaannya pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah (UU No. 70 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1). Karena itu mata pelajaran yang diajarkan hampir sama. Salah satunya mata pelajaran yang diajarkan di SMA dan SMK adalah mata pelajaran PPKn.

Sebagaimana yang sudah disinggung di atas, salah satu kompetensi mata pelajaran PPKn adalah kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan pemecahan masalah dalam PPKn dapat berupa kemampuan yang bersifat umum dan menghadapi masalah sehari-hari (Sholihatin 2012: 91). Kegiatan belajar untuk kemampuan pemecahan masalah dimulai dari mengidentifikasi masalah sampai pada pemecahannya. Pemecahan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan cara sistematis dan empiris. Untuk mata pelajaran PPKn, pembelajaran berbasis masalah dilakukan sistematis berarti sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dirancang, selanjutnya dikerjakan secara empiris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Hamruni 2012: 107-108). Pembelajaran pada mata pelajaran PPKn mendorong siswa untuk berfikir kritis mengenai perkembangan sikap, nilai, norma, maupun hukum. Terdapat beberapa tema pembelajaran yang dapat disajikan dengan *Problem Based Learning*, diantaranya demokrasi, hak asasi manusia dan lain-lain. Tema tersebut disajikan dengan tujuan agar menambah wawasan siswa. Pelaksanaan kurikulum 2013 dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* menjembatani siswa melaksanakan aktivitas dalam pembelajarannya, termasuk pada mata pelajaran PPKn.

Namun kenyataan dalam pembelajaran PPKn yang menghubungkan masalah dengan penyelesaian masalah, kebanyakan hanya bisa dilakukan secara sistematis. Kebanyakan dalam pemecahan masalah secara empiris hanya dilakukan dengan sudut pandang pemikiran seorang saja. Kemampuan siswa untuk memecahkan masalah belum bisa dengan menggunakan proses berfikir tinggi (Sholihatin 2012: 91). Laporan penelitian tindakan kelas (PTK) mengenai penerapan pembelajaran berbasis masalah berikut pembuktiannya, pada kelas XI IPA 4 SMA 1 Nagara tentang peningkatan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran PPKn dengan

menggunakan metode *Problem Based Learning*, memperlihatkan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan diantaranya:

1. Siswa belum terbiasa dengan metode *Problem Based Learning*.
2. Siswa masih ragu dalam mengungkapkan pendapatnya pada saat melaksanakan diskusi kelompok.
3. Tiap kelompok dalam menjawab permasalahan hanya mengacu dalam satu sumber.
4. Masih ada kelompok siswa yang belum bisa presentasi dengan baik.
5. Dalam mengerjakan tugas kelompok siswa banyak bercanda sehingga waktu banyak terbuang dan waktu presentasi menjadi kurang (Anggara, 2013: 11-12).

Dari laporan PTK mengenai pelaksanaan *Problem Based Learning* pada proses pembelajaran tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi. Kendala tersebut sebagai landasan sekaligus koreksi untuk penelitian kembali mengenai pelaksanaan *Problem Based Learning* dalam proses pembelajaran, utamanya dalam pembelajaran PPKn.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian terhadap imlementasi *Problem Based Learning* pada satuan pendidikan. Dalam hal ini tentang Implementasi *Problem Based Learning* dalam Pembelajaran PPKn kelas XI SMK di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Problem Based Learning* dalam pembelajaran PPKn di kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta?
2. Bagaimana kendala atau tantangan implementasi *Problem Based Learning* dalam pembelajaran PPKn di kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta?
3. Bagaimana solusi terhadap kendala atau tantagan implementasi *Problem Based Learning* dalam pembelajaran PPKn di Kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus agar penelitian ini terarah dan fokus, maka dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi *Problem Based Learning* dalam pembelajaran PPKn di kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan tantangan implementasi *Problem Based Learning* dalam pembelajaran PPKn di kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta.
3. Untuk mendeskripsikan solusi terhadap kendala implementasi *Problem Based Learning* dalam pembelajaran PPKn di Kelas XI SMK Muhammadiyah 4 Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah konsep mengenai implementasi *Problem Based Learning* dalam pembelajaran, khususnya dalam PPKn.
 - b. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut yang terkait dan relevan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi Siswa
 - 1) Mendorong dan memfasilitasi siswa untuk berfikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran PPKn.
 - 2) Mendorong keterampilan siswa untuk berani mencoba dalam pembelajaran PPKn.
 - b. Manfaat bagi Guru
 - 1) Menambah wawasan mengenai berbagai konsep metode pembelajaran, khususnya *Problem Based Learning*.
 - 2) Mendorong guru untuk menerapkan alternatif metode yang memacu kreatifitas siswa, khususnya penerapan metode *Problem Based Learning* dalam pembelajaran.

c. Manfaat bagi Sekolah

- 1) Mengembangkan berbagai alternatif metode pembelajaran di sekolah menengah kejuruan.
- 2) Untuk mendorong siswa lebih kreatif dengan metode pembelajaran yang bermakna.